PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Jawa Pos Hari: Selasa Tanggal: 13 Agustus 2024 Halaman: 5

Teras Malioboro

TERSELIP sedikit kegaduhan di tengah keramaian lalu-lalang wisatawan Malioboro. Para pedagang di Teras Malioboro 2 bergolak. Mereka hendak dipindahkan lagi ke lokasi lain.

Pedagang kesal karena merasa menjadi objek yang bisa kapan saja digiring ke sana kemari. Relokasi tentu mengancam kesejahteraan mereka.

Sejatinya, sudah berpuluh tahun pedagang kaki lima (PKL) menghidupkan Malioboro. Mereka menjadi ikon wisata belanja di jalan legendaris yang membelah Kota Jogja tersebut.

PKL Malioboro merupakan etalase seni dan budaya Jogjakarta. Lapak untuk memajang cenderamata karya para perajin maupun seniman. Tempat menyuguhkan makanan khas Kota Gudeg di warung-warung lesehan.

O l e h
ANDRI TEGUH P.
Redaktur Jawa Pos

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Purnomosidi pada akhir 1970-an menggagas perombakan Malioboro (*Tempo*, September 1981). Di kedua sisi jalan dibuat trotoar. Satu untuk pejalan kaki. Satu lagi untuk becak dan PKL. Menteri Kabinet Pembangunan III itu mempertahankan PKL karena mereka umumnya adalah pribumi.

Zaman terus berkembang. Konsep penataan kota mendorong pemerintah daerah (Pemprov DIJ-Pemkot Jogja) mewujudkan ruang publik yang modern. Lebih bersih, indah, dan rapi. Pembenahan itu merupakan bagian dari agenda pendaftaran Sumbu Filosofis sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO.

Sudah tentu, para PKL harus beranjak dari Malioboro. Dari situlah relokasi PKL ke Teras Malioboro 1 dan 2 bermula.

Kebijakan yang bijak seharusnya bisa mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Dalam relokasi pedagang, Pemkot Jogja perlu melibatkan mereka. Aspirasi maupun partisipasi pedagang perlu diwadahi. Pemkot tidak boleh tutup kuping akan keluhan dan harapan mereka.

Kebijakan yang dirumuskan dari semangat kebersamaan akan menumbuhkan harapan baru dan rasa keadilan. Meski tidak akan memuaskan, setidaknya keputusan yang dihasilkan bukan bentuk penindasan. **(*)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005